

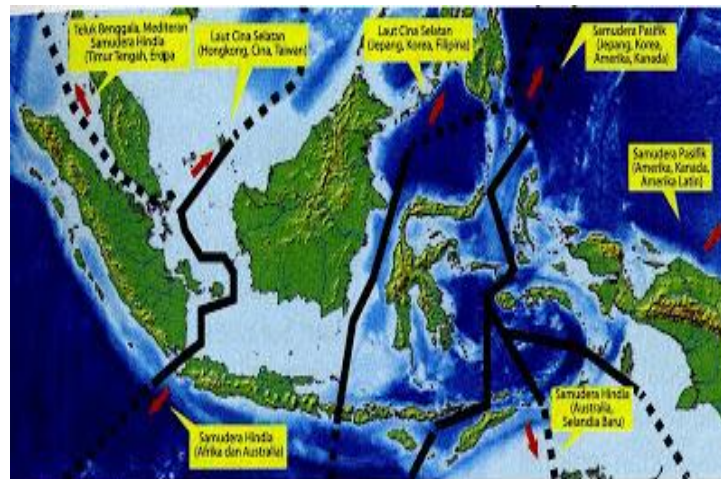
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam lingkup nasional, regional maupun global, dinamika perkembangan lingkungan strategis terus mengalami perubahan khususnya pada spektrum ancaman keamanan. Pergeseran ancaman militer maupun nonmiliter yang terjadi, berimplikasi terhadap pertahanan negara. Hal ini menuntut tiap negara meningkatkan kemampuan pertahanan guna mendukung kepentingan nasionalnya. Dalam buku rujukan pertahanan Indonesia (2015) dinyatakan bahwa dalam upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah serta keselamatan warga negara Indonesia, dari berbagai ancaman merupakan tujuan dari pertahanan negara. Oleh karenanya pertahanan negara dilaksanakan dengan menggunakan berbagai elemen kekuatan, seperti militer, ekonomi, maupun politik, dalam menghadapi berbagai ancaman tersebut.

Sebagai negara dengan luas 5.193.250 km², Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara di kawasan Regional Asia-Pasifik seperti Australia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, India, Republik Palau, Singapura, Timor Leste, Thailand, dan juga Vietnam (Mawardi et al., 2004). Laut Sulu-Sulawesi merupakan salah satu kawasan strategis Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina. Kawasan ini merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur internasional lalu lintas perdagangan Asia Timur dan Pasifik. Setiap tahunnya ditaksir lebih dari 10,000 kapal melewati laut tersebut yang membawa 55 juta metrik ton kargo bernilai sekitar 40 miliar dollar yang membawa batu bara dan berbagai komoditas ke berbagai negara. Oleh karena itu, kawasan ini menjadi satu dari prioritas kebijakan Indonesia.



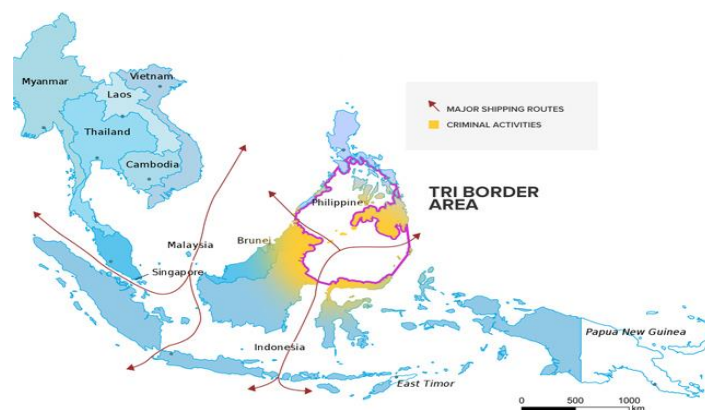
Gambar 1. 1 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Sumber: Pranoto, 2014

Sebagai negara Maritim Indonesia memiliki kepentingan nasional dalam mengimplementasikan kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD). PMD merupakan bagian dari program Nawacita pemerintahan Joko Widodo yang secara khusus tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang aturan wilayah maritim Indonesia. Poros Maritim Dunia merupakan konsep yang muncul karena kondisi keadaan geografis bangsa Indonesia yang luas disertai dengan deretan pulau-pulainya. Dengan ditegakkannya PMD sebagai visi pemerintah Indonesia, maka dasar pijakan pembangunan nasional Indonesia terletak pada pembangunan wilayah maritim nya.

Kemunculan aktor nonnegara sebagai ancaman nontradisional menambah dinamika keamanan menjadi semakin kompleks. Sejak bulan Maret 2016, serangkaian peristiwa sering terjadi di laut Sulu. International Maritime Berau (IMB) menyatakan, peristiwa yang berupa aksi pembajakan maupun penculikan aksi kejahatan dengan intensitas paling tinggi dalam 10 tahun terakhir. Peristiwa tersebut juga acapkali dikaitkan dengan kelompok militan Abu Sayyaf yang berafiliasi dengan jaringan terorisme ISIS sehingga kondisi kawasan tersebut dianggap semakin mengkhawatirkan.

Kondisi keamanan di kawasan ini mendorong ReCAAP (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia) mengeluarkan pernyataan agar seluruh kapal menghindari jalur tersebut (ReCAAP, 2016). Meskipun data terakhir terdapat dua insiden penculikan awak untuk uang tebusan yang dilaporkan di perairan ini selama tahun 2019, namun sebanyak 19 kasus aktual dan 11 kejadian percobaan penculikan awak kapal di wilayah ini telah dilaporkan dalam tiga tahun sejak Maret 2016. Dengan demikian, ReCAAP menganggap penculikan awak untuk uang tebusan tetap menjadi ancaman serius di daerah ini.



Gambar 1. 2 Area of Maritime Interest kerja sama Indomalphi

Sumber: Temby, 2018

Menindak lanjuti ancaman keamanan di Laut Sulu yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Sulawesi-Indonesia, ketiga negara di kawasan laut Sulu-Sulawesi yakni Indonesia, Malaysia serta Filipina telah melakukan serangkaian pertemuan yang menghasilkan beberapa kesepakatan berupa Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) (BBC News, 2017). Pertemuan tersebut membahas isu keamanan kawasan yang memiliki komitmen bersama dalam menjaga serta mengamankan dari berbagai bentuk ancaman khususnya berkaitan dengan kejahatan lintas negara yang menjadi perhatian masing-masing negara. selanjutnya juga

dibahas tentang bagaimana standar operasional prosedur pada setiap kegiatan yang akan dilakukan.

Perjanjian trilateral Cooperation memiliki tiga bentuk rangkaian kerja sama, yaitu *Exercise and Training*, *Coordinate Patrol* dan *Port Visit*. *Exercise and training* dilaksanakan pertama kali pada tahun 2019 dengan nama *Latma Land Exercise* yang melibatkan 180 personil dalam kurung waktu 13 hari. Latihan tersebut beragendakan kegiatan berupa latihan tembak reaksi dan tepat, latihan dengan sniper, latihan pertempuran jarak dekat, serta materi *Non Combatant Evacuation*. Dalam kegiatan patroli, masing negara melakukan kesepakatan dengan berpatroli di wilayah perairan masing masing dengan tetap berkoordinasi mengenai kondisi di kawasan tersebut.

Port Visit sendiri merupakan kegiatan kunjungan kapal ke negara lain yang di mana juga dilaksanakan kegiatan berupa latihan kapal perang dalam suatu skenario yang telah direncanakan bersama. Dalam kegiatan baik dalam maupun luar negeri dilakukan beberapa agenda seperti *courtesy call*, melaksanakan seminar, serta diskusi bagaimana meningkatkan kerja sama sehingga lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan patroli. Kegiatan ini memungkinkan adanya hubungan emosional pasukan yang terbangun antara masing masing negara serta meningkatkan faktor koordinasi sehingga akan berdampak pada kerja sama keamanan yang telah dibentuk. (Sangga, 2018).

Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada Kerja sama *Port Visit* yang diharapkan mampu meningkatkan kerja sama diantara ketiga negara sehingga dapat dibentuk kerja sama serupa seperti patroli bersama, kerja sama Intelijen, Operasi militer gabungan maupun kerjasama lainnya dalam menangani ancaman keamanan di Laut Sulu-Sulawesi. Dari rangkaian pernyataan diatas peneliti berminat untuk melaksanakan suatu penelitian dengan mengangkat sebuah tema terkait diplomasi pertahanan

yang berjudul “**Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Kerja Sama Trilateral Cooperative Arrangement (Port Visit Indomalphi 2017-2019)**”. Penulis berharap melalui penelitian ini, dapat diperoleh hasil yang komprehensif setelah mendapatkan informasi relevan yang didapat dari narasumber maupun studi pustaka.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Kerja Sama Trilateral Port Visit Indomalphi tahun 2017-2019. Lebih spesifik, penelitian dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi sub-fokus antara-lain:

- a. Bentuk Kerja sama Trilateral Port visit Indomalphi 2017-2019.
- b. Rumusan Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Kerja Sama Trilateral Port Visit Indomalphi 2017-2019.

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diulah sebelumnya, maka peneliti merumuskan pertanyaan penlitian yakni:

- a. Bagaimana bentuk Kerja sama Trilateral Port Visit Indomalphi 2017-2019?
- b. Bagaimana rumusan Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Kerja Sama Trilateral Port Visit Indomalphi 2017-2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diperoleh, maka yang menjadi Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Menganalisis bentuk Kerja sama port visit indomalphi 2017-2019.
- b. Menganalisis rumusan Strategi Diplomasi Pertahanan indonesia dalam kerja sama port visit indomalphi 2017-2019.

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat berkontribusi bagi perkembangan studi ilmu pertahanan di Indonesia terutama dalam bidang diplomasi pertahanan. Memberikan tambahan sudut pandangan baru terhadap konsep dan kegiatan diplomasi pertahanan, dan juga ilmu pertahanan yang akan terus berkembang dalam menyesuaikan strategi dan kebijakan untuk menghadapi berbagai ancaman ke depan. Diplomasi pertahanan sebagai ilmu masih terbilang baru sehingga dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Indonesia baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, terutama lembaga-lembaga negara sebagai pengambilan keputusan (decision maker) yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan diplomatik antar negara, maupun Lembaga lainnya yang terkait dengan isu-isu ancaman keamanan internasional. Selain itu, doharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam merumuskan suatu kebijakan bagi lembaga/intansi terkait dalam menjalin kerja sama internasional agar dapat meningkatkan kerja sama serupa dalam menangani kejahatan transnasional, seperti patroli bersama, kerja sama Intelijen, Operasi militer gabungan maupun kerjasama lainnya dalam menangani ancaman keamanan di Laut Sulu-Sulawesi.